



## Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

Jl. Kalibata Utara II No. 78 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan 12760, Tlp/ Fax: (021) 7947608.  
✉: seknas\_fitra@yahoo.com / sekretariat@seknasfitra.org  
http://www.seknasfitra.org & http://www.budget-info.com

Jenis Berkas	Press Release	No. Arsip	PR.12.04/09
Judul	Pemborosan Anggaran Pembentukan TIPIKOR	Tanggal	17 November
Sub Judul Event Terkait		Tahun Penulis	2012 Uchok Sky Khadafi
Kata Kunci	Anggaran TIPIKOR		

### Pemborosan Anggaran Pembentukan TIPIKOR

Pembentukan TIPIKOR untuk 17 lokasi untuk pengadilan Tinggi, dan 17 lokasi juga untuk pengadilan negeri seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Palembang, Medan, Makasar, Samarinda, Padang, pekanbaru, Yogyakarta, Mataram, Banjarmasin, Pontianak, Banten, Lampung, Kupang, dan Jayapura.

Pembentukan TIPIKOR untuk 17 lokasi untuk pengadilan tinggi ini dibutuhkan 68 Hakim Ad hoc, 68 hakim Karir, dan Penitera Pengganti sebanyak 68 orang. Sedangkan pembentukan Pengadilan negeri untuk 17 lokasi dibutuhkan 68 Hakim Ad hoc, 68 hakim Karir, dan Penitera Pengganti sebanyak 68 orang. Total anggaran untuk pembentukan TIPIKOR Pengadilan tinggi, dan Pengadilan Negeri bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

No	Program	Rp
1	Sarana dan Prasarana	167.220.000.000
2	Tunjangan Kehormatan Hakim TIPIKOR	36.089.300.000
3	Biaya operasional dan Sewa Rumah	11.900.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>215.209.300.000</b>

Sumber seknas FITRA dari Bahan Rapat antara DPR dengan MA, dan **KA/KL 2010**

Jadi, anggaran pembentukan pengadilan TIPIKOR sangat besar, dan negara harus menyediakan Rp.215 milyar. Dimana pemborosan anggaran ini akan ditemukan pada alokasi anggaran diperuntukan kepada sarana dan Prasarana sebesar Rp 167 milyar, tunjangan kehormatan Rp.36 milyar, dan Biaya operasional Dan sewa Rumah sebesar Rp.11 milyar.

Kemudian, alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana sebesar Rp.167 milyar banyak diperuntukan untuk pemborosan seperti a) pengadaan Tanah (PN) sebesar Rp.77 milyar; b).Pembangunan gedung sebesar Rp.70 milyar; C).perlengkapan Sarana Gedung sebesar Rp.8.5 milyar; d). Pengadaan kendaraan roda 4 untuk PN sebesar Rp.4.2 milyar, dan pengadaan kendaraan roda 4 untuk PT sebesar Rp.4.2 milyar; e).pengadaan kendaraan roda 2 untuk PN sebesar Rp.340 juta, dan pengadaan kendaraan roda 2 untuk PT sebesar Rp.340 juta; e). Alat pengelolaan data (PN) dalam bentuk Laptov 2 unit setiap daerah dengan total anggaran sebesar Rp680 juta, dan berbentuk PC 2 unit untuk setiap daerah dengan total anggaran sebesar Rp.340 juta; f).alat pengolah data (PT) dalam bentuk seperti laptop 2 unit untuk daerah dengan total anggaran sebesar Rp.680 juta, dan pc 2 unit untuk setiap daerah dengan total anggaran sebesar Rp.340 juta.

Selanjutnya untuk Total anggaran untuk tunjangan kehormatan Hakim TIPIKOR di Pengadilan Tinggi sebesar Rp. 19 milyar. Dimana untuk setiap Hakim AD Hoc akan menerima tunjangan perbulan 16 juta perbulan, Hakim karir akan

menerima tunjangan sebesar Rp.6 juta perbulan, dan Penitera pengganti akan menerima tunjangan sebesar Rp.450 ribu perbulan.

Sedangkan untuk Total anggaran untuk tunjangan kehormatan Hakim TIPIKOR di pengadilan negeri sebesar Rp.16 milyar. Dimana untuk tiap orang Hakim Ad Hoc akan menerima tunjangan sebesar Rp.13 juta perbulan, untuk hakim karir akan menerima Tunjangan sebesar Rp.5 juta perbulan, dan untuk Penitera pengganti akan menerima tunjangan sebesar Rp.375 ribu perbulan.

Dan untuk biaya sewa rumah baik untuk hakim TIPIKOR yang di pengadilan Tinggi dan pengadilan negeri akan menerima Rp.25 juta perorang untuk satu tahun.